

Kerja Sama Pemerintah dan NGO Dalam Pengarustamaan Isu dan Praktik Politik Lingkungan melalui Program Switch Asia

Government and NGO Collaboration in Mainstreaming Environmental Political Issues and Practices through the Switch Asia Program

Sinta Apriyani

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail penulis: sintaapriyani@gmail.com

Diterima: 10 April 2023

Direvisi: 10 Mei 2023

Disetujui: 30 Juni 2023

DOI: [10.35967/njip.v22i1.448](https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.448)

Abstrak: Isu lingkungan diperparah dengan adanya eksploitasi alam besar-besaran seperti terdegradasi lahan pertanian yang menciptakan kerusakan lingkungan di Indonesia. Sebagai respons dari pemerintah dengan berkolaborasi dengan publik untuk solusi atas tantangan ini. Penelitian ini berfokus pada LSM WWF Indonesia untuk melihat kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai kegiatan kolaboratif dengan melihat aspek orientasi isu dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori Gaffar yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Hubungan Pemerintah Dengan LSM Dalam Penerapan *Green Politics*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dokumentasi dan Studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama dalam aspek orientasi isu oleh Pemerintah dan WWF Indonesia mengambil sikap dan tindakan dengan dibentuknya program Switch Asia *local harvest* dari terjadinya kegagalan kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu *Food Estate* yang dirasa menjadi pilihan solusi untuk bertransformasi kepada sistem pangan yang lebih bijak. Kedua dalam aspek kebijakan oleh Pemerintah dan WWF Indonesia dalam penentuan kebijakan pemerintah dilakukan *workshop* pada forum yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah dan organisasi sipil yang menghasilkan *roadmap* pangan Indonesia 2020-2024. WWF Indonesia berperan dalam kolaborasi ini karena kemampuan mereka untuk menyampaikan isu-isu lingkungan. Menurut penulis meskipun beraksi di ruang yang sama, kolaborasi Pemerintah dan LSM diperlukan suatu kepercayaan antara Pemerintah dan LSM.

Kata Kunci: krisis lingkungan; gerakan lingkungan; kelestarian hutan; Lembaga Swadaya Masyarakat.

Abstract: Environmental issues are exacerbated by massive natural exploitation such as degraded agricultural land that creates environmental damage in Indonesia. As a response from the government by collaborating with the public for solutions to this challenge. This research focuses on the NGO WWF Indonesia to see collaboration between the Government and various collaborative activities by looking at aspects of issue and policy orientation. This research uses qualitative methods with a descriptive approach and uses Gaffar's theory which aims to analyze and describe the Relationship between Government and NGOs in the Application of Green Politics. Data collection techniques used in this study are Interview, Observation, documentation and Literature Study. Based on the results of the study showed: First, in the aspect of issue orientation by the Government and WWF Indonesia took a stand and action with the establishment of the Switch Asia local harvest program from the failure of the previous government's policy, namely Food Estate which was felt to be the choice of solution to transform into a wiser food system. Second, in the policy aspect by the Government and WWF Indonesia in determining government policy, workshops were conducted at forums involving stakeholders, academics, government and civil organizations that produced the Indonesian food roadmap 2020-2024. WWF Indonesia plays a role in this collaboration because of their ability to address environmental issues. According to the author, despite acting in the same space, collaboration between the Government and NGOs requires trust between the Government and NGOs.

Keywords: environmental crisis; environmental movement; forest sustainability; Non-Governmental Organization

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan lingkungan bersih untuk menunjang kesehatan mereka. Lingkungan yang bersih ini tentu tercipta dari kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri akan lingkungan sekitar tempat tinggal manusia (Agung, 2018). Persoalan ekologi dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah bahwa alam adalah objek yang boleh diberlakukan dan dieksploitasi sekehendak (Said & Nurhayati, 2020). Isu tentang krisis lingkungan makin menyita perhatian masyarakat dunia. Makin disadari bahwa industrialisasi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia telah menimbulkan ancaman bagi masa depan bumi. Saat ini masyarakat sibuk dengan teknologi dan melupakan topik isu lingkungan. Sebenarnya bukan berarti teknologi dan ekonomi itu tidak bakal maju kalau manusia peduli dengan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha untuk mengimbangi keduanya. Isu lingkungan diperparah dengan adanya eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang ditandai dengan aktivitas seperti pertambangan dan alih fungsi lahan yang berdampak kepada lingkungan contohnya Global Warming dan Climate Change. Sehingga bencana alam ada di depan mata, artinya negara akan mengeluarkan banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam karena perubahan iklim. Tetapi kalau manusia peduli terhadap lingkungan dan regulasi di tingkat nasional ataupun tingkat internasional maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Adanya reformasi dalam sebuah institusi negara dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan dapat mewujudkan demokrasi lingkungan (Pickering et al., 2020). Kepemimpinan politik merupakan hasil dari interaksi antara karakter personal dari pemimpin dari konteks lingkungan politik pada saat memimpin (Elgie, 2015). Maka dibutuhkan pemimpin dan kebijakan negara untuk memperhatikan dan memecahkan masalah krisis iklim maupun krisis lingkungan. Lahir sebuah konsep *green politics* yang merujuk pada komitmen negara dan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Menurut Collins politik hijau berarti suatu keharusan negara untuk melakukan strategi dari isu yang telah terjadi, yaitu krisis lingkungan di belahan dunia saat ini (Collins, 2010). Pandangan dari John Barry politik hijau terdapat tiga prinsip antara lain keadilan intergenerasional, komitmen terhadap proses demokrasi, dan usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi yang menjelaskan perspektif hubungan manusia dan alam (Barry, 2014). Menurut Greenberg and Park menyatakan bahwa politik hijau erat kaitannya dengan hubungan antara manusia terhadap alam (Robbins, 2014). Hutabarat berpendapat dengan adanya *green politics* adalah jalan upaya dalam penyelamatan dan perbaikan lingkungan yang disebabkan eksploitasi besar-besaran oleh industri yang menyebabkan perubahan iklim (Hutabarat, 2022).

Narasi mengenai lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan merupakan bukan hal yang baru di tingkat global, nasional, maupun lokal. Isu ini telah berkembang menjadi awal dari berbagai perubahan relasi antara beberapa pihak, negara, masyarakat, swasta (Rakhman, 2020). Kepemimpinan politik mengambil langkah strategi dalam pengelolaan hutan yang dimulai dari melakukan perencanaan pengelolaan hutan, pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan, mengambil kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Tinov, Marta, Asrida, Hasanuddin, Ishak, 2022).

Sebenarnya dalam aksi negara Indonesia terhadap komitmen terhadap lingkungan sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Salah satunya Green Sukuk Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang menerbitkan investasi wawasan hijau secara reguler setiap tahunnya baik dipasar nasional dan internasional. Green Sukuk Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 2018 sebesar USD1,25 miliar, dan secara berkelanjutan diterbitkan tahun 2019 (USD750 juta), tahun 2020 (USD750 juta) dan Tahun 2021 USD750 juta. Pemerintah Indonesia memulai inisiatif pembiayaan hijau sejak 2017 dengan diluncurkannya kerangka kerja *green sukuk* (Kementerian Keuangan, 2021). Kerangka kerja ini ditujukan untuk membiayai proyek sesuai dengan sektor yang mengacu pada kegiatan yang mendukung transisi menuju pembangunan ekonomi rendah emisi dan ramah lingkungan yang mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta sektor keanekaragaman hayati. Maret Tahun 2022 Indonesia juga mengadakan forum kerja sama multilateral atau G20 yang terdiri dari 19 negara yang termuat di dalamnya terdapat kelompok kerja Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability Working

Group (EDM-CSWG) yang memfokuskan pada isu transisi energi, ekonomi hijau, dan lingkungan berkelanjutan. Dalam hal ini mengenai politik hijau menandakan politik hijau bentuk kegiatannya ekonomi politik (Robbins, 2014).

Upaya penyelamatan dunia bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat bisa berperan dan berkontribusi untuk lingkungan. Salah satu paradigma atau pendekatan dalam buku institusi politik oleh Rhodes, Binder, dan Rockman menyatakan bahwa institusionalisme jaringan makna dari istilah “jaringan” strategi yang dikembangkan untuk menguatkan kelembagaan melalui optimalisasi sinergisitas untuk menguatkan jaringan keputusan kebijakan, penguatan keorganisasian, penguatan daya tawar, intensifikasi mobilisasi politik serta pengembangan dan maksimalisasi gerakan sosial, pengaruh sosial, psikologi sosial dan sosial budaya (Rhodes, Binder, Rockman, 2016). Artinya pemerintah di sini bukan satu-satunya menjadi aktor yang paling berkuasa dalam kebijakan, tetapi ada celah untuk para organisasi nonpemerintahan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Di Indonesia dapat disebut lembaga swadaya masyarakat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang artinya NGO memiliki peran penyeimbang dan gabungan masyarakat yang berada di luar pemerintahan 10 karena NGO juga bisa menjadi jembatan suara masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup.

Alat terbaik pertama untuk mencapai tujuan program ini adalah kesadaran masyarakat, banyak cara untuk mencapai kesadaran, singkatnya kita sering sebut program edukasi/pendidikan, pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya. Pemerintah dengan segala sektornya dipelopori oleh pemerintah yang bekerja sama dengan media, swasta, dan akademisi harus meningkatkan kesadaran masyarakat karena hal itu merupakan indikator utamanya (Zitri, Lestanata, & Umami, 2022). Keberhasilan gerakan environmentalism memberikan pengaruh ke dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang politik dan ekonomi karena menciptakan adanya *Green Politics*. *Green Politics* adalah konsep dalam menghadapi isu lingkungan yang melibatkan negara dan masyarakat seperti organisasi-organisasi nonnegara seperti WWF Indonesia untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan dalam isu lingkungan. NGO WWF Indonesia memiliki beragam kegiatan yang mengangkat dari isu-isu atau permasalahan baik itu domestik maupun internasional. Tuntutan dari masyarakat adat tidak jauh dari persoalan pengakuan hak teritorial, hak sosial budaya dan hak politik (Fuentes & Fernández, 2022). Gerakan yang cukup terkenal yaitu *earth hour* dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukannya mampu menarik banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam gerakan menjaga lingkungan ini (Rasyid & Felixiani Keviola, 2020). Tak hanya itu di pulau Kalimantan salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Persoalan tersebut menginisiatif WWF Indonesia untuk memiliki proyek penyelamatan kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo/HoB*) yang merupakan inisiatif untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diprakarsai bersama oleh tiga negara yang berada di pulau itu yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dengan moto ‘Tiga Negara Satu Visi Konservasi’. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang (Kementerian Keuangan, 2021).

Program *Heart of Borneo* dan Green Sukuk Indonesia pada tahun 2016-2020 sudah rampung dan dilanjutkan dengan adanya program pada tahun 2021 hingga saat ini yaitu *Switch Asia Local Harvest* untuk Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia. Sederet persoalan pangan global ini, dalam skala yang berbeda juga terlihat di Indonesia. Selain itu, praktik pertanian yang buruk telah merusak tanah, mencemari dan menguras persediaan air, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Laporan panel ahli Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) pada 2019 menyebutkan, sektor pangan berkontribusi besar menyebabkan sejuta spesies flora dan fauna menuju ambang kepunahan. Beban ganda masalah gizi di Indonesia terjadi sejak awal siklus kehidupan, menunjukkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi dalam mengakses pangan. Hal ini sejalan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 yang menunjukkan ada 25 kabupaten yang masuk prioritas 1,

artinya butuh penanganan serius. Sebanyak 19 kabupaten prioritas 2 dan 27 prioritas tiga. Sementara itu ada juga 1 kota yang masuk prioritas 1, 1 kota prioritas 2 dan 3 kota prioritas 3 (HIVOS, 2022). Berbagai latar belakang mengenai persoalan pangan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih krisis pangan yang disebabkan krisis iklim dan krisis lingkungan dalam fokus peneliti dalam upaya yang dilakukan dalam penerapan *Green Politics*. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas hubungan yang terjalin antara Pemerintah dan WWF Indonesia pada program *Switch Asia Local Harvest* di Indonesia.

Hal inilah diperlukan ruang politik untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan lembaga masyarakat. Dari sudut pandang politik ekologi, perubahan lingkungan (baik kerusakan maupun upaya perbaikannya) adalah merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks suatu negara, interaksinya di antara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global (Murtasidin & Sigalingging, 2020). Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO-Pemerintah. NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pada tingkat praktiknya ada beberapa dimensi yang ikut mempengaruhi terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO. Menurut Riker ada 4 (empat) dimensi untuk menganalisis hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Dalam artikel ini peneliti akan menganalisis dari aspek orientasi isu dan kebijakan.

Pada penelitian Timotius Doyle dan Brian Doherty mengatakan gerakan environmentalisme digunakan untuk menaklukkan keberlanjutan lingkungan sebagai simbol pembebasan atau penindasan pada lingkungan untuk syarat sebuah negara pemerintahan hijau (Doyle & Doherty, 2006). Penelitian dari Kelvin Mason mengatakan bahwa tindakan warganegara dalam gerakan keadilan lingkungan adalah strategi mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan sebagai wujud politik partisipatif dalam gerakan keadilan global (Mason, 2014).

Pada artikel ini penulis akan memfokuskan lembaga swadaya masyarakat *World Wide Fund for Nature* Indonesia untuk diteliti mengenai hubungan pemerintahan dalam penerapan *green politics*. Dilansir di situs WWF Indonesia melakukan tindakan dan aksi nyata untuk mengupayakan keberlanjutan alam dan manusia dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan kondisi dengan mendorong nilai-nilai konservasi lingkungan hidup, membangun koalisi dengan masyarakat, pemerintah dan swasta serta memengaruhi kebijakan dan mendorong penegakan hukum guna terlaksana tata kelola lingkungan yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah Bagaimana Hubungan Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penerapan *green politics* dalam aspek orientasi isu dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian dalam artikel ini pada dasarnya untuk mengetahui: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Hubungan Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penerapan *Green Politics* dalam aspek orientasi isu dan kebijakan.

Metode

Dalam menulis artikel ini, penulis akan menjelaskan cara kolaborasi pemerintah dan LSM WWF Indonesia dalam menerapkan *green politics* di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Artikel ini ingin menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan WWF Indonesia dengan memerhatikan aspek orientasi isu dan kebijakan dalam mengatasi kerentanan pangan akibat perubahan iklim dan eksploitasi lahan pertanian di Indonesia. Sehingga penelitian kualitatif dianggap sangat cocok untuk dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang telah ditentukan. Penyelidikan ini menekankan eksplorasi batas-batas kasus atau berbagai kasus secara rinci dan dalam, disertai dengan mengeksplisitkan data dari sumber daya informasi yang diperlukan. Pendekatan ini bersifat empiris dan digunakan untuk mengeksplorasi terjadinya pengalaman nyata yang biasa disebut sebagai fenomena, dan dalam konteksnya, itu tidak bekerja dengan jelas (Creswell, 2016). Keuntungan dari pendekatan ini adalah keberadaan sistem batas yang membatasi kasus yang diangkat

dalam bentuk program, acara, kegiatan, dan subjek penelitian yang ditentukan oleh waktu. Literatur yang membahas pendekatan ini terutama membantu para peneliti memfokuskan pendekatan studi kasus: 1) jenis pertanyaan penelitian; 2) analisis mendalam; 3) Proses Perspektif.

Lokasi penelitian berada di kantor WWF Indonesia dan Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia karena dalam forum diskusi mengenai program Switch Asia dilakukan, sehingga peneliti menganggap sangat cocok untuk melakukan penelitian tentang penerapan *Green Politics* dalam isu pangan akibat perubahan iklim dan eksploitasi alam di Indonesia. Sumber data yang digunakan dibagi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan wawancara langsung dengan Staf pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan aktivis LSM WWF Indonesia. Agar penelitian ini menjadi objektif, penulis juga mencari data kegiatan mengenai Program Switch Asia. Selain itu, data sekunder diambil dari dokumen yang ada dan diperoleh langsung dari kantor WWF Indonesia dan Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama satu tahun, dari Agustus 2022-Juni 2023. Hal terakhir adalah menggunakan reduksi data untuk menguji validitas atau keaslian penelitian ini dengan mengklasifikasikan, memfokuskan, memilih data yang tidak perlu, dan menarik kesimpulan yang dapat diverifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Aspek Orientasi Isu

Menurut Doucet, orientasi isu merupakan tujuan individu, pihak atau organisasi terkait dengan konsep yang membentuk pengetahuan individu yang berbeda-beda dalam sikap atau tindakannya dalam melihat suatu kejadian (Doucet et al., 2023). Menurut Elton ketika individu mengamati persoalan yang sedang berlangsung, orientasi terhadap masalah tersebut adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh seorang individu sebagai warga negara. Sebagai hasil dari pertimbangan ini, mungkin ada ketidaksepakatan individu karena peristiwa terkini (Elton et al., 2022). Dapat disimpulkan orientasi isu dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan dari keprihatinan mengenai krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia yang memaksa Pemerintah dan WWF Indonesia untuk mengambil sikap atau tindakan dari terjadinya peristiwa untuk mencari solusi dari dampak perubahan iklim.

Dalam upaya penyelamatan masa depan, setidaknya dua kepentingan yang harus diselamatkan, yaitu kepentingan pembangunan (kebutuhan suatu bangsa untuk membangun dan tumbuh secara ekonomi, sosial dan budaya), dan kepentingan lingkungan (*environmental sustainability*). Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, yang diikuti dengan terbentuknya suatu komisi lingkungan tingkat dunia yaitu *World Commission on Environment and Development (WCED)*.

Di Indonesia, berbagai peristiwa gagal panen akibat cuaca ekstrem semakin sering ditemukan. Kenaikan suhu global, mengakibatkan kondisi cuaca yang tidak menentu. Gagal panen akibat cuaca ekstrem semakin sering terjadi di Indonesia. Masyarakat harus menanggung biaya lebih untuk memperoleh pasokan karbohidrat, protein, dan serat. Sementara, lonjakan harga pangan, tidak pernah benar-benar mendatangkan kesejahteraan bagi petani. Berikut potret dampak dari krisis iklim yang mempengaruhi produktivitas pangan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Isu Krisis Pangan Di Indonesia

No.	Lokasi	Krisis Pangan
1.	Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua	Embun beku di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua mengakibatkan rusaknya lahan pertanian masyarakat dan terjadinya gagal panen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sekitar 500 lebih kepala keluarga mengalami kelaparan

2. Brebes Petani kehilangan kesempatan panen hampir 50 persen dari yang seharusnya mereka panen akibat hujan ekstrem.
3. Jawa dan Sumatera petani cabai menderita kerugian akibat hujan ekstrem.
4. Desa Kasihan, Sukolilo, 200 hektar sawah di area banjir setelah hujan deras selama tiga hari
Pati, Jawa Tengah

Sumber: *Greenpeace* Indonesia, 2022

Petani, justru ikut menderita kerugian karena hasil panen yang tidak maksimal. Sementara, mereka harus tetap menanggung biaya produksi yang semakin tinggi (Fitra, 2022) Brown dan Funk (2008) telah mengingatkan bahwa sistem pangan adalah salah satu yang paling terdampak dari krisis iklim dalam beberapa dekade mendatang. Semua penilaian kualitatif menunjukkan bahwa krisis iklim akan mengakibatkan kerentanan pangan.

Pada tahun 2020 pemerintah memberikan perhatian akan ancaman krisis pangan dengan adanya program *Food Estate* dengan penambahan luas lahan pertanian dan mendorong pertanian skala besar. *Food Estate* digagas Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian dengan mengembangkan bidang teknologi oleh tanam karena proyek ini dilakukan menggunakan teknologi dan kecanggihan digital. Lokasi proyek ini meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Tetapi proyek ini tampak tak membuahkan hasil setelah satu tahun beroperasi. Guru Besar IPB Dwi Andreas mengatakan dalam kajian ilmiah *Proyek food estate* di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan terdapat permasalahan; pertama, kelayakan iklim dan tanah; kedua, merusak lingkungan karena berada pada lahan gambut yang mencetak satu juta hektar tanah yang sangat berpotensi deforestasi skala besar; ketiga, proyek ini menimbulkan perampasan tanah bagi petani, penggarap dan masyarakat hukum adat dengan alasan klaim PSN yang berdampak merugikan petani pemilik tanah dan menjadi buruh tani; keempat, proyek ini ada keterlibatan militer yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak melibatkan petani sebagai produsen pangan dan beralih kepada korporasi swasta. Berikut dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Proyek *Food Estate* (Limbung Pangan)

Sumber: *Greenpeace* Indonesia, 2021

Disebabkan praktik pertanian yang buruk seperti proyek *food estate* di region Sumatra dan Kalimantan telah merusak tanah dan hutan, mencemari dan menguras persediaan air, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Kerangka kerja ini dirasa menjadi solusi dan upaya yang dibuat WWF Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerangka kerja tersebut termuat di dalamnya program *Switch Asia Local Harvest* untuk tujuan pangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Keterlibatan gerakan lingkungan dalam politik diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti partai politik, lembaga masyarakat atau gerakan masyarakat itu sendiri (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020). Proses politik menentukan proses kebijakan (Febrina & Isril, 2018). Permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah Indonesia memang menimbulkan sebuah gerakan sadar dan peduli masyarakat kepada lingkungan. Senada dengan pernyataan Rommel pada negara Eropa, politisasi masalah lingkungan menyebabkan dasar kelompok lingkungan di tingkat lokal dan regional. Sebagian besar kelompok-kelompok muncul secara spontan dan termotivasi oleh dan memprotes kepada pemerintah mengenai kebijakan lingkungannya.

Dengan demikian, indikator orientasi isu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan WWF Indonesia mengambil sikap dan tindakan dari terjadinya krisis iklim yang berdampak kepada krisis pangan di Indonesia dengan dibentuknya program *Switch Asia Local Harvest* untuk sistem pangan berkelanjutan Indonesia karena terjadinya kegagalan kebijakan pemerintah sebelumnya, yaitu *Food Estate* yang dirasa menjadi pilihan solusi untuk bertransformasi kepada sistem pangan yang lebih bijak dan membangun alternatif sebuah sistem pangan yang diterima petani lokal dan lebih kolaboratif, berkeadilan sosial dan memerhatikan ekologis. Sehingga masyarakat dapat membangun kembali ketahanan pangan dan mampu mengatasi guncangan di masa depan.

Aspek Kebijakan

Menurut Doucet, kebijakan publik sebagai proses politik berkaitan erat dengan konsep demokrasi karena proses kebijakan pada dasarnya berorientasi pada akomodasi kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud jelas merupakan proses tarik-menarik dari berbagai kepentingan di masyarakat yang kemudian membentuk opini publik (Doucet et al., 2023). Menurut Elton, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*). Usulan yang dimaksud adalah usulan tindakan yang berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan (Elton et al., 2022). Dapat disimpulkan kebijakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan tindakan dari pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan diawali dialog antara pemerintah maupun LSM yang membentuk suatu opini yang kemudian akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan untuk kepentingan bersama.

Green politics dan teori lingkungan hidup memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya peduli pada lingkungan dunia. Perbedaannya adalah *green politics* lebih kritis daripada teori lingkungan hidup. Politik hijau melihat keseimbangan ekologi, manusia dan makhluk hidupnya karena menurut *green politics* menjaga keseimbangan ekologi akan melindungi manusia. Menurut Jerald Mast:

Pemenuhan kebutuhan manusia (anthropocentric) menyebabkan krisis lingkungan hidup. Anthropocentric diartikan bahwa alam berpusat pada manusia sehingga membuat manusia bertindak secara eksploratif berlebihan terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya green politics menyadarkan manusia untuk bijak mengatasi permasalahan isu lingkungan baik ditingkat nasional maupun internasional (Mast, 2013:737)

Dalam hal ini bahwa politik hijau berkaitan dengan organisasi hubungan sosial, ekonomi dan politik manusia yang berkomitmen antara manusia dan alam. Politik hijau dapat didasarkan pada harapan bahwa manusia harus sadar dan peduli terhadap lingkungan alamnya di tengah terjadinya isu-isu lingkungan seperti kerusakan alam yang diakibatkan eksploitasi alam dunia saat ini. Gerakan *environmentalism* dan *green politics* merupakan fenomena menarik dalam kajian sosial politik saat ini karena keduanya saling berkaitan. Hal ini dikarenakan kedua pemikiran tersebut dapat melahirkan rezim pemerintahan yang unik terhadap permasalahan lingkungan. Peranan Indonesia sebagai *bridge builder*,

baik dalam isu *climate change*, IEG, forum UNFCCC maupun UNEP. Ada hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun jembatan tersebut. Jembatan yang dibangun tidak hanya untuk kehebatan dan pencitraan (*glory*) semata tetapi harus adanya tujuan yang benar-benar dapat diperoleh (*gold*) segenap bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia misalnya dapat menjadi *political leverage* yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik luar negeri (Afrizal, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mengesahkan:

1. *Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto terkait Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004).
2. *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.

Selain itu terdapat *Paris Agreement* atau Kesepakatan Paris yang diadopsi di *Conference of Party* (COP) 21 diselenggarakan di Paris pada 12 Desember 2015, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. *Paris Agreement* merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rezim iklim global. *Paris Agreement* yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2°C dan disepakati oleh 196 negara, diibaratkan oleh Christiana Figueres, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC, sebagai “*huge flame of hope*”. *Paris Agreement* menjadi model kontrak sosial dunia yang baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global. Lima poin penting dalam *Paris Agreement*, yaitu:

1. Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celsius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. Bantuan, termasuk pendanaan US\$100 miliar bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip *applicable to all parties* (berlaku untuk seluruh pihak), memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara berkembang. Negara-negara berkembang yang dalam konvensi disebut sebagai negara *non-Annex*, harus ikut serta dalam upaya global untuk memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pada saat yang bersamaan harus beradaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu negara-negara harus bertransformasi dengan cepat, menuju pembangunan rendah karbon dan berdaya terhadap dampak perubahan iklim. Dari perjalanan mengenai kebijakan politik lingkungan di atas dari skala global.

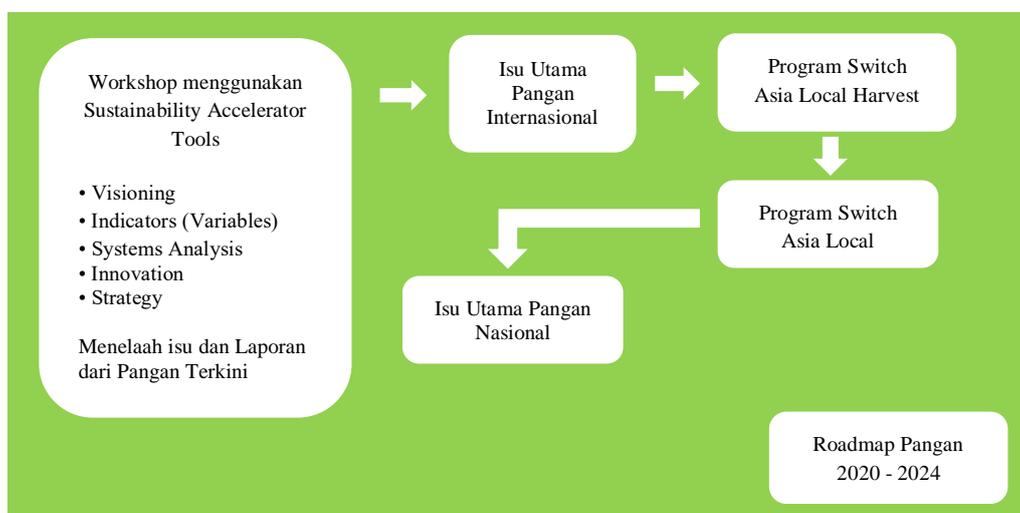
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa pemenuhan pangan harus memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Tujuan ini juga dituangkan di dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kedua kerangka regulasi ini merupakan fondasi dari transformasi sistem pangan Indonesia. Untuk itu perlu diwujudkan sebuah sistem pangan berkelanjutan yang mampu mempraktikkan pangan di Indonesia dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam sistem dan praktik pangan di Indonesia, sejalan dengan semangat inklusif yang diamanatkan oleh SDGs dalam mengatasi tantangan terhadap perubahan global yang diakibatkan oleh perubahan iklim maupun kebijakan pemerintah. Dari perjalanan mengenai kebijakan politik lingkungan di atas dari skala tingkat nasional.

Pada tahun 2020 Uni Eropa yang bermitra dengan WWF Indonesia mengumumkan ‘Kesepakatan Hijau’ kepada Pemerintah Indonesia dengan memelopori serangkaian kebijakan dan tindakan untuk

produksi pangan berkelanjutan. Strategi tersebut yakni program *Local Harvest* yang bertujuan untuk menciptakan sistem penyediaan pangan yang adil, sehat, dan ramah lingkungan. Program *Switch Asia Local Harvest* mendukung pola transformasi konsumsi dan produksi pangan secara berkelanjutan sebagai sebuah solusi untuk mencapai upaya ketahanan pangan yang berkedaulatan untuk mencapai kesejahteraan melalui serangkaian lokakarya dan forum dialog dengan keterlibatan utama yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dari perwakilan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nasional (Tranggono et al., 2019).

Proyek *Switch Asia Local Harvest* menjadi sebuah kebijakan dalam menghadapi tantangan dan hambatan krisis pangan di Indonesia. Kerangka implementasi kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia Program *Switch Asia Local Harvest* merupakan solusi untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang ramah lingkungan dan sehat, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Diharapkan program *Switch Asia Local Harvest* dapat mempertahankan karakter budidaya pangan tradisional dan lokal sebagai praktik pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan (Aditya, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah sebelum program *Switch Asia Local Harvest* yaitu *Food Estate* tidak bisa menjawab dan mengatasi krisis pangan di Indonesia. Wilayah kegiatan program *Switch Asia Local Harvest* dilakukan 14 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, mencakup Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Salah satu keluaran dari kegiatan ini terjadinya lobi dan advokasi melalui sebuah platform nasional dan lokal yang melibatkan seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan sistem pangan di Indonesia dan menciptakan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Setelah dilakukannya *workshop* pada forum yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik-praktik terbaik dalam sistem pangan serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dan implementasi program terkait sistem pangan. Sehingga strategi dan inovasi tersebut dapat menjadi program prioritas yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pangan di Indonesia. Hasil akhir yang akan didapat adalah *roadmap* pangan berkelanjutan yang akan dicapai. Berikut peta Pangan Berkelanjutan Nasional 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Roadmap Pangan Berkelanjutan Nasional 2020-2024

Sumber: Switch Asia, 2021

Diperlukan pergeseran paradigma pangan yang mendasar agar Indonesia dapat menerapkan sistem pangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil *workshop* yang diadakan WWF Indonesia dengan *focus group discussion*, telaah bahan paparan tentang pangan, dan telaah literatur, diperoleh beberapa isu pangan yang mengemuka di Indonesia pada saat ini. Isu-isu ini akan menjadi fokus pada perumusan strategi dan *roadmap* pangan Indonesia 2020-2024. Pada dasarnya Program Switch Asia *Local Harvest* mempromosikan empat prinsip yakni, lokal, sehat, adil dan lestari dan konsep ‘pangan bijak’ dipilih karena ingin mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Tantangan ke depannya program ini dapat dilaksanakan secara lokal dan nasional, serta menyinergikan kolaborasi antar Lembaga baik itu pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, indikator kebijakan dalam penentuan kebijakan pemerintah mengenai alternatif ide/gagasan yang diberikan WWF Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjalin kerja sama dengan dilaksanakannya program Switch Asia *Local Harvest* pada 14 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, mencakup Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Salah satu keluaran dari kegiatan ini terjadinya lobi dan advokasi melalui sebuah *platform* nasional dan lokal yang melibatkan seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan sistem pangan di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah solusi dari pemerintah bersama WWF Indonesia untuk bertransformasi untuk keberlanjutan sistem pangan di Indonesia. Berikut tabel hasil diskusi *workshop* yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Hasil Diskusi *Workshop* Program Switch Asia *Local Harvest*

Aspek	Praktik Saat Ini	Sistem Pangan Berkelanjutan
Produksi	Berorientasi Produksi	Berorientasi Pemenuhan Gizi Masyarakat Indonesia
Pemasaran dan Distribusi	Produk pangan “didorong” ke pasar/konsumen	Produk pangan ”ditarik” ke pasar/konsumen sesuai dengan kebutuhan gizi
	Promosi pangan berorientasi pada produk pangan itu sendiri	Promosi pangan berorientasi pada aspek kesehatan (kebutuhan gizi) dan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)
Keragaman	Pangan pokok berorientasi pada padi, jagung, dan kedelai	Pangan pokok dan bahan pangan berorientasi pada keragaman dan pemanfaatan sumber daya setempat
Sarana dan Prasarana	Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul seragam dan pupuk kimia	Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul setempat dan praktik pertanian organik
Prioritasi pangan dan komoditas	Sumber daya pangan sebagai pangan dan sebagai komoditas tidak dipisahkan secara tegas	Lahan terbatas; ada pemisahan tegas antara sumber pangan sebagai bahan pangan dan sebagai sumber energi dan komoditas, dengan pangan sebagai prioritas
Kebijakan	Kebijakan pangan terpisah-pisah antar sektor; koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi	Pangan berkelanjutan sebagai tujuan bersama; perencanaan pangan nasional dan daerah beserta penerapannya dilakukan secara terintegrasi; setiap pelaku/pemangku kepentingan melakukan swakoordinasi

Sumber: Switch Asia *Local Harvest*, 2020

Dengan demikian, indikator kebijakan dalam penentuan kebijakan pemerintah mengenai alternatif ide/gagasan yang diberikan WWF Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjalin kerja sama dengan dilaksanakannya program Switch Asia *Local Harvest* pada 14

kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, mencakup Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Salah satu keluaran dari kegiatan ini terjadinya lobi dan advokasi melalui sebuah *platform* nasional dan lokal yang melibatkan seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan sistem pangan di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah solusi dari pemerintah bersama WWF Indonesia untuk bertransformasi untuk keberlanjutan sistem pangan di Indonesia.

Sehingga, dimensi ruang politik antara Pemerintah dan WWF Indonesia dalam aspek orientasi isu, kebijakan, organisasional dan finansial dalam mempengaruhi hubungan politik LSM dan Pemerintah teridentifikasi hubungan yang terjalin pertama, orientasi isu dengan sikap dan tindakan yang sepaham mengenai krisis iklim yang mempengaruhi sistem pangan di Indonesia. Kedua, kebijakan dengan membentuk program Switch Asia Local Harvest untuk mendiskusikan persoalan pangan di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan ruang politik yang terwujud sudah berjalan dengan semestinya. Dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia, kebijakan yang ada dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Pada dasarnya kebijakan pemerintah menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan yang jelas terlihat selama ini di tengah masyarakat, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak masyarakat yang harus dipenuhinya oleh pemerintah itu sendiri (Vebrianto, 2016). Setelah aspek orientasi itu dengan terwujudnya kegiatan dan regulasi maka selanjutnya bagaimana Pemerintah dan WWF Indonesia melaksanakan perannya. Politik hijau menuntut pihak-pihak terlibat untuk mengilustrasikan makna keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan (Narzary, 2021).

Persoalan lingkungan sering kali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup juga harus dianggap penting (Nurmardiansyah, 2015). Jika pembangunan berkelanjutan diandaikan sebagai upaya kompromi harmonis antara kebutuhan pertumbuhan dan pelestarian lingkungan serta aspek sosial, maka partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting yang dapat mendorong terciptanya *good enviromental governance* (Asnelly, 2018). Sejalan dengan pendapat bahwa otonomi daerah dalam proses desentralisasi dalam praktiknya tidak seindah yang direncanakan (Supratiwi, 2013). Kepemimpinan yang berkomitmen terhadap tujuan pelestarian lingkungan dibutuhkan kepemimpinan politik mengambil langkah strategi dalam pengelolaan hutan yang dimulai dari melakukan perencanaan pengelolaan hutan, pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan, mengambil kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Namun strategi dari kepemimpinan politik belumlah optimal disebabkan oleh komitmen yang masih lemah (Tinov, Marta, Asrida, Hasanuddin, Ishak, 2022). Ada potensi bahwa suatu saat nanti akan ada politisi yang tidak melihat perlindungan lingkungan dan peraturan sebagai masalah politik sama sekali tetapi sangat memahami bahwa bumi ini perlu berkelanjutan untuk masyarakat pada masa depan (Stolar, 2019).

Inisiatif dari WWF Indonesia dapat memberikan titik terang mengenai kelestarian hutan di Pulau Kalimantan. Tetapi gerakan lingkungan bukan persoalan aspek mewujudkan kebijakan saja. Setiap lembaga yang komitmen terhadap lingkungan baiknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kekuatan nilai, norma dan kearifan lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat adat menjadi modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijiwai dari semangat (Ishak, Marta & Febrina, 2022). Dengan sinergi antara edukasi tentang lingkungan dari eksternal dan kearifan lokal dalam lingkup internal, upaya menjaga kelestarian lingkungan bisa berlangsung lebih efektif (Asnelly, 2018).

Sebagaimana halnya hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas lingkungan hidup bersifat universal, yang artinya hak tersebut melekat pada setiap manusia dan menjadi kewajiban masyarakat nasional maupun internasional dan negara untuk menegakkan dan memenuhinya sepanjang masa. Penghancuran lingkungan hidup dan krisis iklim yang terjadi sebagai akibat dari model

pembangunan yang eksploitatif. Laporan IPCC (AR6, 2022) menyebutkan bahwa dunia akan menghadapi bahaya iklim dalam dua dekade ke depan, krisis iklim semakin memburuk. Gelombang panas, kekeringan, banjir, dan dampak turunannya seperti krisis pangan dan air menjadi fakta yang tak terbantahkan, yang diingatkan oleh para ahli sebagai pengingat bagi kemanusiaan. Krisis iklim telah dan akan terus menyebabkan kerugian dan kerusakan secara luas bagi alam dan manusia (Khalid, 2022). Upaya kolaboratif yang dilakukan WWF Indonesia bersama KLHK ini dapat menumbuhkan dan menghasilkan pengambilan keputusan pemerintah karena kehadiran jaringan LSM dalam pengelolaan sistem pangan dapat menghadapi tantangan persoalan sistem pangan di Indonesia. Selain itu menurut Weber Organisasi non-pemerintah (LSM) khususnya, termasuk nirlaba, badan amal, dan perusahaan sosial, sangat membantu dalam penyampaian tujuan masyarakat. LSM memiliki potensi untuk membawa manfaat sosial dan ekologis (Elton et al., 2022). Dalam menghadapi tantangan ekologis yang lebih besar dan peristiwa gangguan besar, kolaborasi yang kuat dengan LSM dianggap penting (Konijnendijk van den Bosch, 2014) untuk tujuan pembangunan dalam hal ini transformasi sistem pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Terlepas dari manfaatnya yang terdokumentasi, kolaborasi proyek Switch Asia *Local Harvest* merupakan tantangan yang kompleks dan menghadirkan tantangan bagi kelompok kepentingan dalam praktiknya. Secara esensi, LSM diharuskan untuk berinteraksi dengan kelompok lain untuk membangun kapasitas mereka dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sistem pangan berkelanjutan (Nordin et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, setelah mengamati, mengetahui dan mencoba memahami hubungan pemerintah dan WWF Indonesia dalam menerapkan *green politics* di Indonesia melalui program Switch Asia *Local Harvest* dengan memperhatikan aspek orientasi isu dan kebijakan maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Orientasi isu dalam hubungan KLHK dan WWF Indonesia adalah untuk mengatasi kegagalan program *Food Estate* yang hanya menguntungkan korporasi. Sehingga orientasi isu KLHK dan WWF Indonesia berupaya dalam membenahi kerusakan lingkungan dengan program Switch Asia *Local Harvest* untuk mencapai sistem pangan berkelanjutan dengan ramah lingkungan.
- b. Kebijakan dalam hubungan KLHK dan WWF Indonesia dibangun melalui serangkaian lokakarya dan forum dialog yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dari perwakilan seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pertanian (KEMENTAN), Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Pertanian (KEMENTAN) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nasional. Sehingga membangun komitmen dan keputusan bersama.

Setelah disadari, Program Switch Asia *Local Harvest* yang bersifat holistik dan inklusif harus dibangun sebagai jawaban integral atas berbagai permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia. Program ini adalah wujud dari Pemerintah dan WWF Indonesia dalam menghadapi krisis pangan di Indonesia yang menciptakan upaya yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Setelah mengetahui indikator dimensi hubungan kekuasaan Pemerintah dan LSM dari Gaffar untuk memeriksa dimensi hubungan kekuasaan antara Pemerintah dengan WWF Indonesia yaitu orientasi isu dan kebijakan terjalin adalah kolaborasi. Bila merujuk dari penjelasan hubungan yang terjalin antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan WWF Indonesia dengan orientasi isu, kebijakan, organisasional dan finansial terdapat keuntungan bagi KLHK dalam melibatkan WWF Indonesia karena ide/gagasan dalam program Switch Asia *Local Harvest* mendukung tercapainya upaya pangan yang berkelanjutan. WWF Indonesia yang melibatkan mitra utama yaitu Uni Eropa dalam pemberian dana. Melalui upaya ini telah menjangkau dan melibatkan 5.604 aktivis yang menyatakan dukungan mereka seperti gerakan *Earth Hour* yang berfokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim telah mengadopsi pangan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi kampanyenya.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global,” *Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)* 10, no. Prosiding Konvensi Nasional X
- Aditya, N. R. (2021, August 12). Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif Terhadap Krisis Iklim. *Kompas.Com*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/12/08/14465041/Indonesia-Disebut-Negara-Paling-Tidak-Responsif-Terhadap-Krisis-Iklim>
- Agung, L. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam. *Jurnal Penelitian Islam*.
- Asnelly, A. (2018). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing. *Indonesian Journal Of International Relations*, 1(2). <https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29>
- Barry, J. (2014). *Political Ideologies*(London:).
- Collins, D. (2010). Hot, Flat, And Crowded: Why We Need A Green Revolution—And How It Can Renew America, By Thomas L. Friedman. New York: Farrar, Straus And Giroux, 2008. Hardcover, 448 Pages, \$27.95. ISBN-10: 0-374-16685-4. *Business Ethics Quarterly*, 20(1), 127–134. <https://doi.org/10.5840/Beq20102019>
- Creswell, J. W. (2016). Reflections On The MMIRA *The Future Of Mixed Methods* Task Force Report. *Journal Of Mixed Methods Research*, 10(3), 215–219. <https://doi.org/10.1177/1558689816650298>
- Doucet, T., Duinker, P., Charles, J., Steenberg, J., & Melanie, Z. (2023). Characterizing Non-Governmental Organizations And Local Government Collaborations In Urban Forest Management Across Canada. *Springer Environmental Management*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2958350/v1>
- Doyle, T., & Doherty, B. (2006). Green Public Spheres And The Green Governance State: The Politics Of Emancipation And Ecological Conditionality. *Taylor & Francis*, 15:5(Environmental Politics), 881–892. <https://doi.org/10.1080/09644010600937504>
- Elgie, R. (2015). *He Foundations Of The Study Of Political Leadership*. In *Studying Political Leadership*. Algrave Macmillan.
- Elton, A. J., Harper, R. W., Griffith, E. E., & Weil, B. (2022). Exploring Urban Forestry Non-Governmental Organisations (Ngos) In The Eastern United States. *Arboricultural Journal*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/03071375.2022.2129202>
- Febrina & Isril, R. (2018). Proses Politik Dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30).
- Fitra, S. (2022). Krisis Pangan Dan Tantangan Masa Depan. *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masa-depan/>
- Fuentes & Fernández, C. A., J. E. (2022). The Four Worlds Of Recognition Of Indigenous Rights. *Journal Of Ethnic And Migration Studies*, 3202–3220.
- Geurts, C. (N.D.). *Kampanye Publik: Pangan Bijak Nusantara Oleh Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia Charles-Michel Geurts*. <https://panganbijak.org/pilih-pangan-bijak-untuk-keanekaragaman-hayati-ketahanan-pangan-kesehatan-dan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki Dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- HIVOS. (2022, Oktober). *Transformasi Sistem Pangan Berbasis Keberagaman Budidaya Dan Budaya Nusantara*. <https://panganbijak.org/rekomendasi-dialog-independen/>
- Hutabarat, G. F. I. (2022). *KAJIAN GREEN POLITIC THEORY DALAM UPAYA MENANGANI DEFORESTASI PAPUA TERKAIT AKTIVITAS EKSPANSI*. 7(2).

- Ishak, Marta & Febrina, A. & R. (2022). Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan Dan Demokrasi(Pembelajaran Dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21No. 02Tahun 2022, 161–168.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Green Sukuk Dari Indonesia Untuk Dunia: Vol. Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021*. Buletin SSN.
- Khalid, K. (2022, Desember). Kita Semua Memiliki Hak Atas Lingkungan Hidup. *Greenpeace Indonesia*. [https://www.Greenpeace.Org/Indonesia/Cerita/55905/Kita-Semua-Memiliki-Hak-Atas-Lingkungan-Hidup/](https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55905/kita-semua-memiliki-hak-atas-lingkungan-hidup/)
- Konijnendijk Van Den Bosch, C. (2014). *From Government To Governance: Contribution To The Political Ecology Of Urban Forestry*. 35–46. <https://doi.org/10.4324/9781315882901>
- Mason, K. (2014). Becoming Citizen Green: Prefigurative Politics, Autonomous Geographies, And Hoping Against Hope. *Taylor & Francis*, 23:1(Environmental Politics), 140–158. <https://doi.org/10.1080/09644016.2013.775725>
- Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik Dalam Kerjasama Voluntary Partnership Agreement (Vpa) Indonesia-Uni Eropa. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1167>
- Narzary, R. (2021). Green Politics To Achieve Sustainable Growth In India. *PalArch's Journals of Archaeology of Egypt*, 18(1).
- Nordin, N., Khatibi, A., & Azam, S. M. F. (2022). Nonprofit capacity and social performance: Mapping the field and future directions. *Management Review Quarterly*. <https://doi.org/10.1007/s11301-022-00297-2>
- Nurmardiansyah, E. (2015). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/vej.1422>
- Pickering, J., Bäckstrand, K., & Schlosberg, D. (2020). Between environmental and ecological democracy. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1703276>
- Rakhman, M. A. (2020). *Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi*. 4(4).
- Rasyid, I., & Felixiani Keviola, J. R. (2020). Gerakan Earth Hour Tangerang Dalam Perspektif Politik Lingkungan. *ijd-demos*, 2(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i2.42>
- Rhodes, Binder, Rockman, R. A. ., S. A. .., B. A. (2016). *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford University Press.
- Robbins, P. (2014). *Political Ecology*.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Stolar, E. A. (2019). *Green Politics: The Impact of Grassroots Organizations on Environmental Political Movement*. Fordham University.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Supratiwi. (2013). Partai Politik & Politik Hijau: Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang ProLingkungan di Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 109–117. <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.109-117>
- Tinov, Marta, Asrida, Hasanuddin, Ishak, M. Y., Auradian, Wan. (2022). Kepemimpinan Politik Lokal untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kasus di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21No. 01Tahun 2022, 85–94.
- Tranggono, A., Wirman, C., Sulistiowati, A., & Avianto, T. (2019). *SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA*. Hivos/Konsorium Local Harvest. www.panganbijak.org
- Vebrianto, A. (2016). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala. *Jurnal Katalogis*.

Zitri, Lestanata, & Umami, I., Yudhi & Rizal. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Wastedi Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21 No. 01 Tahun 2022, 107–119.